

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Ketahanan Perbankan

Dewasa ini ketahanan sektor keuangan sangatlah penting. Istilah terkait dengan isu ketahanan sektor keuangan, khususnya sektor perbankan menjadi fokus utama berbagai negara di dunia. Terkait dengan ketahanan dalam sektor perbankan, Crossen et al (2014) menjelaskan bahwa perbankan dikatakan memiliki ketahanan jika memenuhi dua kondisi seperti: (i) perbankan mampu menyerap guncangan tanpa harus bergantung pada dukungan dari pihak pemerintah, (ii) kemampuan sektor perbankan dalam menjalankan fungsi-fungsi ekonomi secara berkelanjutan, khususnya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, seperti menyediakan kredit, menghimpun dana dari masyarakat, pembayaran dan transaksi jasa ataupun pencetaan uang. Sedangkan Berry et al (2015) mendefinisikan bahwa ketahanan dalam sektor perbankan merupakan suatu kondisi dimana individual bank mampu menahan guncangan dari berbagai sumber, baik dari internal perbankan maupun dari eksternal perbankan. Ketika timbul gejala guncangan, maka perbankan akan mampu menyesuaikan atau menyerap risiko atau merespon dengan cepat setiap guncangan yang muncul, sehingga perbankan mampu mengantisipasi secara dini berbagai potensi guncangan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Di sisi lainnya, Bank Indonesia (2010) menjelaskan bahwa pentingnya ketahanan sektor perbankan bagi Indonesia dikarenakan sektor ini menjadi

salah satu sektor utama yang berperan dalam menjalankan perekonomian Indonesia dan mayoritas pangsa pasar lembaga keuangan di Indonesia didominasi oleh sektor perbankan.

2. Teori Krisis keuangan

Gejolak krisis keuangan global telah mengubah tatanan perekonomian dunia. Krisis global yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007, mulai semakin dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk negara berkembang pada tahun 2008. Sejumlah kebijakan yang sangat agresif di tingkat global telah dilakukan untuk memulihkan perekonomian. Di Amerika Serikat, sebagai episentrum krisis, kebijakan pemerintah baru yang menempuh langkah serius untuk mengatasi krisis, menjadi faktor positif yang dapat mengurangi pesimisme akan resesi yang berkepanjangan dan risiko terjadinya depresi. Sementara itu, kemauan negara-negara industri maju lainnya untuk berkoordinasi dalam kebijakan pemulihan ekonomi juga diharapkan dapat meningkatkan keyakinan pelaku pasar. Namun, proses berbagai lembaga keuangan memperbaiki struktur neracanya (*deleveraging*) yang diperkirakan masih terus berlangsung, serta dampak umpan balik dari sektor riil ke sektor keuangan, menyebabkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global masih tinggi.

3. Minsky Theory

Teori ini dicetuskan oleh seorang ekonom Amerika Serikat yang bernama Hyman Minsky. Teori ini melihat bahwa krisis keuangan yang ada saat ini, memiliki sifat siklikal yang bersandar pada teori siklus bisnis (*theory*

of business cycle) atau saat ini populer disebut dengan Minsky Moment. Teori siklus bisnis menjelaskan bahwa muncul sikap agresif lembaga keuangan dan investor dalam memberikan dan menerima kredit ketika perekonomian sedang ekspansif (*boom*) dan mengambil tindakan berkebalikan ketika perekonomian sedang kontraksi (*bust*), sehingga menimbulkan tingginya praktek spekulasi. Fluktuasi atau gerakan naik (*boom*) dan turun (*bust*) secara alamiah mengandung unsur ketidakstabilan keuangan (*financial instability*) (Prasetyantoko, 2008).

Dalam melihat fenomena ketidakstabilan keuangan (*financial instability*), Minsky mengajukan *The Financial Instability Hypothesis*. Asumsi dari *The Financial Instability Hypothesis* adalah dinamika yang ada dalam perekonomian memiliki keterkaitan yang erat dengan struktur hutang dalam level perusahaan. Dalam *The Financial Instability Hypothesis*, Minsky (1992) mengategorikan perilaku pelaku ekonomi menjadi tiga bagian yaitu:

a) *Hedge*

Pada tahapan ini, pelaku ekonomi dapat memenuhi semua kewajiban pembayaran hutang dari hasil operasional perusahaannya, baik berupa cicilan dan juga hutang pokoknya, sehingga dalam fase ini pelaku ekonomi dapat membayar hutangnya dengan baik. Disamping itu, dalam fase ini para pelaku ekonomi sangat berhati-hati dalam melakukan hutang dan bahkan pelaku ekonomi pada tahap ini cenderung menahan melakukan hutang untuk investasi yang baru.

b) *Speculative*

Pada fase ini, terjadi ekspansi investasi yang baru oleh pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi melakukan ekspansi bisnis melalui skema hutang. Dalam kaitannya dengan hutang, pelaku ekonomi pada fase ini hanya mampu membayar bunga pinjaman dari kas yang dimilikinya, namun tidak mampu untuk membayar hutang pokoknya. Pada fase ini, pelaku ekonomi cenderung membayar hutang dengan cara menjual asetnya, disamping itu pelaku ekonomi melakukan hutang kembali pada pihak lain untuk bisa membayar hutang pokoknya.

c) *Ponzi Finance*

Pada fase ini, pelaku ekonomi tidak bisa lagi melakukan pembayaran terhadap bunga pinjaman dan juga hutang pokok yang dimilikinya. Dalam fase ini, kewajiban yang dimiliki pelaku ekonomi melebihi dari nilai-nilai asetnya. Kondisi kewajiban yang lebih besar dari aset ini, menyebabkan pelaku ekonomi kesulitan dalam memenuhi kewajiban, bahkan jika pelaku ekonomi menjual seluruh asetnya, hutang yang dimiliki tidak mampu dibayarkan.

Dalam *The Financial Instability Hypothesis*, Minsky (1992) menjelaskan bahwa jika dalam perekonomian, pelaku ekonomi yang mendominasi adalah yang bersifat *hedge*, maka kondisi perekonomian akan berada pada posisi yang baik dan juga seimbang. Tetapi jika dalam perekonomian di dominasi oleh pelaku ekonomi yang *speculative* dan *ponzi*, maka perekonomian suatu negara akan sangat rentan terhadap krisis keuangan, karena kedua sifat ini akan mendorong tingginya kredit macet pada perbankan.

Teori Minsky dapat menjelaskan terkait dengan krisis keuangan di Indonesia 1997/1998 dan krisis keuangan global 2008. Pada tahun 1997/1998 rata-rata neraca perusahaan berada pada posisi yang sangat buruk yang menyebabkan kredit macet, sehingga berdampak terhadap sektor perbankan menjadi kolaps. Disisi lainnya, pelaku ekonomi banyak melakukan pinjaman luar negeri, sehingga ketika terjadi krisis nilai tukar 1997/1998 para pelaku usaha mengalami peningkatan nilai hutang akibat depresiasi rupiah. Saat krisis keuangan 1997/1998, mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia berada pada posisi *speculative* dan *ponzi*, sehingga ketika terjadi gejolak nilai tukar, para pelaku ekonomi dan perbankan *kolaps*.

B. Landasan Konsep

1. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa jenis perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu bank umum dan BPR yang sama-sama memiliki fungsi sebagai *agent of development* yaitu agen yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi disuatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Maryandi, 2014). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan lalu lintas pembayaran yang dimana fungsi bank umum lebih luas dibandingkan.

2. BPR Konvensional

a. Pendirian BPR

Menurut sumitro (1996) dalam kebijaksanaan PAKTO (Paket oktober) SK Menkeu No.1064/KMK/1998 tanggal 27 Oktober 1998 bahwa yang bisa mendirikan BPR adalah Koperasi atau Warga Negara RI Badan Hukum Indonesia, Pemerintah Daerah setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia setelah memenuhi syarat bank. Pemberian izin untuk pendirian BPR dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

1. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan mendirikan bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam perbankan, seperti antara lain mengusahakan pengesahan dari Menteri Kehakiman atas Anggaran Dasar BPR yang berbentuk hukum PT, penyiapan gedung dan peralatan kantor, penyiapan dan tata kerja.
2. Izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melanjutkan usaha ketika usaha itu sudah dinilai siap dan memenuhi kriteria dalam persyaratan bank.

b. Sasaran dan Tugas BPR

Sasaran BPR adalah melayani kebutuhan petani, peternak, pegawai, pensiunan, pengusaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah yang tidak

terjangkau oleh bank umum untuk mencapai pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan agar mereka tidak jatuh kepada para pelepas uang dan sistem ijon (Subagyo et.al, 1997).

Tugas pokok BPR yang pada mulanya diarahkan untuk menunjang pertumbuhan masyarakat di daerah pedesaan yang masih menerapkan sistem ijon dan para pelepas uang. Tetapi semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditunjukan bagi masyarakat pedesaan tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan (Hasibuan, 2001).

c. Kegiatan Usaha BPR

Menurut Taswan (2010) untuk mewujudkan tugas pokoknya dalam memperoleh keuntungan dengan menghipun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat maka BPR melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana dari masyarakat yang kekurangan dana hanya dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan .
3. Menetapkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan ada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR adalah sebagai berikut:

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap kebutuhan masyarakat menengah kebawah.
3. Melakukan kegiatan volute asing.

3. Resiko Kredit

Risiko kredit, didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya sehingga timbul kredit macet. Menurut Darmawi (2011) indikator yang digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah NPL yaitu perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan bank kepada debitur.

Bank membagi peringkat kreditnya kedalam beberapa kategori kolektibilitas. Adapun kategori kolektibilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut (SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005):

1. Kredit lancar, yaitu kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman bungan dan atau bunganya selama 90 hari dari waktu yang dijanjikan
3. Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 120 haridari waktu yang dijanjikan

4. Kredit diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 180 hari dari jadwal yang telah dijanjikan
5. Kredit macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 180 hari sejak tahun tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

4. Risiko Likuiditas

Menurut Hayati (2017) risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

5. Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. CAR menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Rasio permodalan ini merupakan komponen kecukupan pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum) terhadap ketentuan yang berlaku (SE Bi No.6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004).

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan setiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut juga *Capital Adequency Ratio* (CAR), ketentuan CAR adalah 8%. Rasio CAR diperoleh dari modal yang dibagi dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Perhitungan modal dan ATMR berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM yang berlaku. Secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

6. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to Deposit Ratio LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2007:272), rasio LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Semakin tinggi LDR, maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) . Sebaliknya, semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas. Apabila total kredit yang diberikan lebih besar daripada jumlah dana yang dihimpun maka akan mengindikasikan bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut.

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya LDR maksimum menurut peraturan pemerintah adalah 110%. Rumus untuk mencari Loan to Deposit Ratio sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Pemberian Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

7. Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya

operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan lainnya. BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional, yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Resiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan. BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan oprasional}} \times 100$$

8. *Return On Assets (ROA)*

Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan, dengan rasio ini kita bisa menilai apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasionalnya (Darsono dan Ashari, 2005 : 78). Suatu bank dapat dimasukkan dalam kategori sehat apabila memiliki rasio ROA minimal 1,5%. ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva atau assets yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu manajemen lembaga keuangan dalam

menghasilkan keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA yang dihasilkan maka semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh suatu bank tersebut. Rumus untuk mencari ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

9. *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

NPL yang besar akan berdampak negatif terhadap tingkat investasi, meningkatkan kewajiban deposito dan membatasi ruang lingkup kredit. Untuk mengetahui besarnya tingkat NPL suatu bank, maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan NPL dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai dengan Surat 8 Edaran Bank Indonesia No.

3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang perhitungan rasio keuangan bank, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) tentang pengaruh dana pihak ketiga, *efisiensi operasional* (BOPO) dan *size of bank* terhadap likuiditas *cash ratio* (studi BPRS di Yogyakarta yang terdaftar di BI periode 2012-2014) dengan hasil menunjukkan secara simultan DPK tidak berpengaruh terhadap *Likuiditas Cash Ratio*, sedangkan variabel BOPO dan *Size Of Bank* berpengaruh terhadap *Likuiditas Cash Ratio* sedangkan dalam penelitian Arifuddin (2012) tentang analisis pengaruh CAR,LDR,BOPO, dan NPL terhadap ROA pada BPR dan disini juga dia membahas tentang Perbandingan ROA pada BPR BPR Wilayah Iramasuka dengan Wilayah Sulawesi Selatan pada Periode 2008-2010 Hasil dari penilitian ini menunjukkan variabel NPL dan LDR berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA sementara CAR berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap ROA serta BOPO berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA. Dilihat dari sisi perbandingan peneliti menggunakan rata-rata keseluruhan ROA pada BPR untuk melihat perbandingan kinerja antar BPR, dari hasilnya tidak ada perbedaan antara ROA pada BPR Sulawesi Selatan dan ROA pada BPR skala Nasional, sedangkan antara ROA pada BPR Sulawesi selatan dengan ROA pada BPR wilayah Sulawesi ada perbedaan.

Selanjutnya penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan juga diteliti oleh Wijaya (2015) tetapi disini wijaya meneliti perbandingan antara kinerja keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah yang berjudul tentang analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Konvensional dengan Bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu CAR dan QR menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah sedangkan ROA dan BOPO menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan dalam penelitian Rahman (2012) yang juga meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional periode 2001-2010 dengan hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dilihat dari CAR dan NPL serta terdapat perbedaan kinerja secara signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari ROA, NIM, dan LDR.

Selanjutnya adalah penelitian Tahalliman (2015) yang juga membahas tentang perbandingan kinerja keuangan yang disini dia hanya membandingkan antara Bank Syariah dengan Bank syariah yang berjudul analisis perbandingan kinerja keuangan antara Bank Muamalat dengan Bank Syariah Mandiri tahun 2005-2014 dengan hasil yang diperoleh yaitu terdapat perbedaan yang signifikan untuk NIM, sedangkan untuk CAR, NPA, ROA, ROE, BOPO dan LDR tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara bank muamalat dan bank mandiri syariah.

Selanjutnya adalah Wiwin Indrawati (2012) melakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* pada Bank pemerintah di Indonesia. Hasil dari penelitian Wiwin menunjukkan Rasio LDR, IPR, APB, NPL, BOPO, AUR, ROA, NIM, dan IRR, secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank-bank Pemerintah periode 2005 – 2007. Besarnya pengaruh variabel LDR, IPR, APB, NPL, BOPO, AUR, ROA, NIM, dan IRR secara simultan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank-bank Pemerintah sebesar 83.8 persen, sedangkan sisanya sebesar 16.2 persen dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa LDR, IPR, APB, NPL, BOPO, AUR, ROA, NIM, dan IRR, secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank-bank Pemerintah periode 2005 – 2007 diterima.

Krisna (2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* pada bank-bank umum di Indonesia dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti *Return on Investment*, *Return on Equity*, Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi, *Net Interest Margin*, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Loan*. Hasil penelitian Krisna tersebut menunjukkan bahwa *Return on Investment*, *Loan to Deposit Ratio* dan *Non Performing Loan* secara parsial mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio*, sedangkan *Return on Equity*, Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi, dan *Net Interest Margin* tidak signifikan mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan bank ROI memiliki pengaruh positif, LDR memiliki

pengaruh negatif, dan NPL memiliki pengaruh negatif) berpengaruh signifikan terhadap CAR pada bank umum yang beroperasi di Indonesia periode 2003–2006. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa variabel LDR dan NPL mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap CAR. NPL merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai dari beta standar sebesar -2,043. Berdasar hasil.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Metode Analisis	Kesimpulan
1	Shingjergji (2015)	CAR, ROA, ROE, NPL, LDR	Analisis regresi berganda	Meneliti tentang determinasi CAR pada perbankan albania, Hasil yang diperoleh dari penelitian ini meliputi sebagai berikut: ROE dan ROA selaku indikator profitabilitas tidak berdampak pada CAR, NPL memiliki dampak negatif pada CAR yaitu apabila rasio kredit yang tinggi maka rasio kecukupan modal menjadi sedikit, rasio LDR memiliki hasil yang sama dengan rasio NPL begitu pula dengan EM, akan tetapi total aset berpengaruh positif pada rasio kecukupan modal.
	Hidayanti (2013)	CAR, ROA, LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, NIM.	Analisis regresi berganda	Hasilnya menunjukkan bahwa LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, NIM dan ROA secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel CAR pada bank-bank pemerintah.
3	Fatimah (2014)	CAR, ROA, FDR, BOPO.	VECM	Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu, bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR, yaitu bila ROA tinggi maka CAR akan mengalami pelemahan begitu sebaliknya, hubungan BOPO terhadap CAR pada penelitian berpengaruh signifikan positif baik dari jangka panjang maupun pendek, tetapi pada

				hubungan FDR terhadap CAR pada jangka pendek mengalami signifikan negatif, namun berbeda pada jangka panjang dimana diperoleh signifikan positif.
4	Indrawati (2012)	CAR, LDR, IPR, APB, NPL, BOPO, AUR, ROA, NIM, dan IRR	Analisis Deskriptif Analisis Statistik	Rasio LDR, IPR, APB, NPL, BOPO, AUR, ROA, NIM, dan IRR, secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)
5	Krisna (2008)	CAR, ROI, ROE, BOPO, NIM, LDR, dan NPL	Analisis regresi linier berganda	ROI, LDR dan NPL secara parsial mempengaruhi CAR, sedangkan ROE, BOPO dan NIM tidak signifikan mempengaruhi CAR
6	Barus (2011)	CAR, ILM, ROE, LDR, QR	Analisis regresi linier berganda	Dari hasil analisisnya penulis menuliskan bahwa <i>Interest Margin on Loans</i> (IML), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) dan <i>Quick Ratio</i> (QR) berpengaruh secara signifikan terhadap CAR. Tetapi Indikator <i>Return on Equity</i> (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR.
7	Widjanarko (2005)	CAR, ROI,	Analisis regresi linier	ROI, ROE, dan LDR mempunyai yang signifikan terhadap CAR, sementara BOPO, NIM, dan GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR.

		ROE, BOPO, NIM, LDR dan GWM	berganda	
8	Afanasief et al (2004)	CAR, ROI, INFLASI, SB BOPO, NPL dan LDR	Analisis regresi	Inflasi dan tingkatsuku bunga dan rasio CAMEL (CAR, ROI, BOPO, NPL dan LDR) berpengaruh signifikan terhadap CAR
9	Laurence A Manullang (2002)	CAR,ROI dan ROE	Analisis regresi linier berganda	ROI dan ROE tidak signifikan untuk meningkatkan nilai CAR
10	Angbazo (1997)	CAR, IRR, LDR, NPL, dan BOPO	Analisis regresi linier berganda	LDR dan BOPO menunjukkan pengaruh yang positif terhadap CAR sedangkan IRR dan NPL tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap CAR

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara darisuatu persoalan yang masih perlu adanya pembuktian kebenaran dan diharuskan bersifat logis, jelas dan dapat diuji. Berikut merupakan hipotesis pada penelitian ini:

1. Loan to Deposite Ratio (LDR)

H0: Diduga LDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada bank perkreditan rakyat di Indonesia periode Maret 2009 hingga Desember 2016.

H1: Diduga LDR berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada bank perkreditan rakyat di Indonesia periode Maret 2009 hingga Desember 2016.

2. Return on Assets (ROA)

H0: Diduga ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada bank perkreditan rakyat di Indonesia periode Maret 2009 hingga Desember 2016.

H1: Diduga ROA berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada bank perkreditan rakyat di Indonesia periode Maret 2009 hingga Desember 2016.

3. Non-Performing Loan (NPL)

H0: Diduga NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada bank perkreditan rakyat di Indonesia periode Maret 2009 hingga Desember 2016.

H1: Diduga NPL berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada bank perkreditan rakyat di Indonesia periode Maret 2009 hingga Desember 2016.

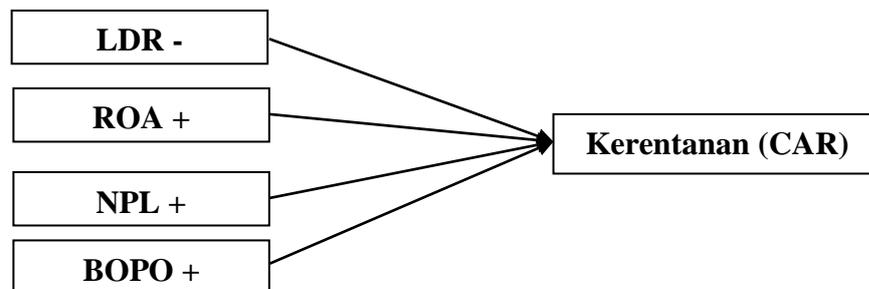
4. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

H0: Diduga BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada bank perkreditan rakyat di Indonesia periode Maret 2009 hingga Desember 2016.

H1: Diduga BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap kerentanan pada bank perkreditan rakyat di Indonesia periode Maret 2009 hingga Desember 2016.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir